



POLICY BRIEF AMF UNTUK DPR RI

ESG DALAM PARLEMEN SEBAGAI AKSELERASI MEWUJUDKAN KETAHANAN IKLIM

SERI PERUBAHAN IKLIM
EDISI III - JULI 2023

Anwar Muhammad Foundation
amf.or.id | admin@amf.or.id
PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan
mirekel.id | info@MIREKEL.id

ESG dalam Parlemen sebagai Akselerasi Mewujudkan Ketahanan Iklim

Penasihat

Aldi M. Alizar

Koordinator

Roni Wijayanto

Tim Penyusun

Afini Nurdina Utami

Bening Kalimasada Aura K.

Hatta Vrazila

Muhamad Azami Nasri

Muhammad Hasan Izzurrahman

Ringkasan

Komitmen ENDC Indonesia untuk menurunkan emisi GRK masih dinilai memiliki target yang belum cukup ambisius dan kurang strategis. Padahal, pencapaian target *net-zero emissions* harus segera tercapai agar dampak yang dirasakan Indonesia tidak semakin parah. ESG dapat mendukung pencapaian target ENDC dengan mendorong praktik berkelanjutan dan memfasilitasi investasi pada proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Parlemen memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip ESG dan memastikan keselarasan antara tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk ketahanan iklim. Peningkatan kesadaran terkait ESG dalam tata kelola parlemen dapat menjadi langkah awal. Regulasi serta kebijakan yang berdampak langsung pada kinerja ESG dapat dimutakhirkan agar pelaksanaan ESG lebih tegas dan terarah. Sinkronisasi kerangka ESG antar sektor industri dan level pemerintahan juga perlu dilakukan. Parlemen harus menggunakan laporan ESG untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Dengan menerapkan ESG secara komprehensif dan konsisten, parlemen dapat memainkan peran sentral dalam mendorong Indonesia menuju ketahanan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Meningkatkan Kesadaran ESG dalam Tata Kelola Parlemen
2. Pemutakhiran Peraturan terkait ESG
3. Harmonisasi Kerangka ESG
4. Utilisasi Laporan ESG untuk Keputusan yang Strategis

Latar Belakang Masalah

Komitmen ENDC Indonesia

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menaggulangi perubahan iklim ditunjukkan melalui komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa syarat (dengan usaha sendiri) sebesar 29% dan target bersyarat (dengan dukungan internasional) hingga 41% pada tahun 2030. Pada 2022, Indonesia mengikuti 194 negara lainnya dalam memperbarui NDC kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan adanya *Enhanced NDC* (ENDC) dengan target penurunan emisi GRK tanpa syarat menjadi 31,89% dan bersyarat sebesar 43,2%. Hal ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mencapai target Persetujuan Paris serta memperkuat keselarasan antara tujuan iklim dan tujuan pembangunan negara (IGGP, 2021; Komitmeniklim.id, 2021; UNFCCC, n.d).

Peningkatan komitmen NDC mendapatkan berbagai tanggapan dari banyak pihak. *Institute for Essential Service Reform* (IESR) menilai Pemerintah Indonesia ragu-ragu dalam menetapkan target penurunan emisi dan dinilai terlalu mudah dicapai karena referensi berdasarkan peningkatan emisi *business as usual* pada tahun 2030 (Simanjuntak, 2022). Selain itu, rencana dan aksi ENDC masih kurang cukup, terlebih dalam menjelaskan strategi untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara, serta masih tidak sejalan dengan pencapaian Persetujuan Paris (Bulolo, 2022; Climate Action Tracker, 2022).

ESG dapat Mendukung Pencapaian Target ENDC dan SDGs

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas berdasarkan hubungan timbal baliknya dengan tiga aspek (lingkungan, sosial, dan tata kelola) yang saling terkait. ESG memberikan pemahaman yang lebih luas kepada investor dan pemangku kepentingan tentang kinerja non-keuangan entitas yang menunjukkan risiko dan peluang investasi.

Pilar lingkungan berfokus pada bagaimana suatu entitas dapat meminimalisir dampak operasionalnya terhadap lingkungan maupun bagaimana strategi menghadapi risiko perubahan kualitas lingkungan. Pilar sosial menilai performa entitas dalam mengatasi isu sosial melalui pelayanan kepada masyarakat serta bagaimana entitas menyikapi isu sosial untuk keberlanjutan bisnisnya secara internal. Aspek tata kelola mengevaluasi struktur dan praktik internal perusahaan serta isu-isu sosial seperti perubahan peraturan, ekspektasi pemangku kepentingan, dan perkembangan standar tata kelola global.

Penerimaan konsep ESG dalam mengakselerasi upaya Indonesia dalam mewujudkan komitmen NDC semakin meningkat, terutama karena permintaan investasi ESG melonjak (Maxwell & Tynan, 2021). Pertimbangan ESG memiliki peran penting dalam mendukung upaya **mitigasi** perubahan iklim karena mendorong praktik berkelanjutan dan memfasilitasi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam konteks **adaptasi**, ESG memberikan kerangka kerja yang mempromosikan praktik-praktik membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Para investor semakin memberikan dukungan keuangan untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi dan solusi rendah karbon yang baru sebagai upaya mitigasi serta proyek adaptasi perubahan iklim, seperti infrastruktur yang tangguh, pengelolaan sumber daya, serta kesiapsiagaan bencana.

Upaya akselerasi penanganan perubahan iklim ini lebih lanjut mendukung perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan nomor 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim. Aspek lingkungan dalam ESG juga menasar pada tujuan-tujuan SDGs lain, meliputi tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan tujuan 15 (Ekosistem Daratan), yang merupakan bagian dari penanganan perubahan iklim. Perspektif sosial ESG juga mendukung SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 5 (Kesetaraan Gender), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), yang masing-masingnya berkaitan dengan proses penanganan perubahan iklim yang berkeadilan. Tidak hanya itu, aspek tata kelola dapat meningkatkan upaya mencapai SDGs nomor 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Hal ini menunjukkan bahwa ESG, upaya penanganan perubahan iklim, hingga SDGs merupakan serangkaian tujuan.

Parlemen dan ESG

Parlemen, khususnya komisi IV, VII, XI, Kaukus Ekonomi Hijau, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) memainkan peran penting dalam mengawasi dan membersamai pemerintah dalam mewujudkan SDGs, termasuk tujuan ketahanan iklim. NDC merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan tersebut. Prinsip ESG sangat selaras dengan SDGs. **Melalui 3 (tiga) kerangka kerja konvensional (legislasi, anggaran, dan pengawasan) serta peran konstituante dan diplomasi, parlemen diharapkan dapat menyusun agenda ESG, mendorong praktik-praktik yang bertanggung jawab, dan mendukung perubahan positif dalam masyarakat, sehingga ketahanan iklim dapat dicapai dengan lebih cepat.** Upaya kolektif parlemen dan sektor swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG sangat penting untuk mengatasi tantangan global dan membangun Indonesia yang lebih tangguh dan inklusif terhadap risiko perubahan iklim.

Tujuan

Policy Brief ini bertujuan untuk **memantik kesadaran akan pentingnya posisi parlemen sebagai institusi dalam menerapkan praktik ESG yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang mendukung percepatan perwujudan ketahanan iklim di Indonesia.**

Hasil dan Pembahasan

ESG bersinggungan dengan mandat pemerintah untuk melindungi masyarakat, struktur sosial dan kelembagaan, serta lingkungan (Orenstein & Cooke, 2022). ESG dapat diterapkan dalam praktik bernegara dengan adanya landasan regulasi dan kebijakan. Parlemen sebagai lembaga **legislatif** diharapkan andil dengan merancang regulasi dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kinerja ESG maupun standarisasinya, memenuhi kebutuhan rakyat, memecahkan silo kebijakan, dan menegakkan hak asasi manusia tanpa mengecualikan siapapun. Pelaksanaan ESG yang semakin awam akan mempermudah parlemen menjalankan fungsi **pengawasan** terhadap pemerintah. Dengan memperhatikan dimensi ESG, parlemen dapat menilai sejauh mana pemerintah telah memprioritaskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam implementasi kebijakan.

Saat ini, tidak hanya perusahaan, terdapat semakin banyak yurisdiksi yang melakukan pemeringkatan performa ESG. Selama beberapa tahun terakhir, lembaga peringkat kredit dan agen riset investasi seperti Moody's, S&P, Fitch, dan MCSI mulai menerapkan faktor-faktor ESG dalam penilaian risiko pemerintah. Peringkat ESG yurisdiksi secara langsung mempengaruhi peringkat kredit pemerintah, kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan (Orenstein & Cooke, 2022). Indonesia memiliki sumber daya keuangan publik yang terbatas dalam mendukung penanganan perubahan iklim (IESR, 2022). Hal ini memaksa Indonesia memiliki kredit yang baik untuk meningkatkan pembiayaan iklim dari *International Finance Institutions* serta bank multilateral dan bilateral. Parlemen dapat berperan dalam perumusan anggaran melalui pembahasan dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dan sidang paripurna. Parlemen juga memiliki Komisi Anggaran serta melakukan pengawasan terhadap eksekusi **anggaran** pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Parlemen juga memiliki peran sebagai **konstituante** untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk konstituen, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan, yang prihatin dengan isu-isu ESG. Parlemen dapat mengoptimalkan perannya sebagai perwakilan rakyat yang membawa aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam menghadapi isu-isu ESG, termasuk krisis iklim yang mempengaruhi Indonesia.

Lebih lanjut, parlemen memiliki fungsi **diplomasi**. Kerja sama regional dan internasional Indonesia terkait ESG masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan, terlebih agenda diplomasi ini dapat menjadi ajang *benchmarking*. Terdapat seruan yang semakin meningkat bagi pemerintah dan bisnis untuk membuat komitmen *net-zero* dan segera mengambil tindakan yang lebih kuat terhadap perubahan iklim. Sentimen publik untuk keberlanjutan lebih kuat dari sebelumnya dan kesadaran akan isu-isu ESG juga meningkat. Kerja sama internasional sangat diperlukan dengan mendesak untuk memastikan bahwa praktik terkait ESG dan transisi iklim berkembang dengan cara yang tidak menyebabkan fragmentasi pasar, serta menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar.

Implikasi dan Rekomendasi

Meningkatkan Kesadaran ESG dalam Tata Kelola Parlemen

Pengetahuan mengenai ESG ini sangat penting, terutama oleh para pimpinan parlemen. Hal ini mengingat ESG dapat mengakselerasi pencapaian komitmen ENDC dan mewujudkan SDGs di Indonesia. **Internalisasi konsep ESG ini harus dimulai dari pucuk pimpinan organisasi.** Ini untuk mendorong inisiatif dan komitmen yang tinggi dari pimpinan parlemen sehingga mempercepat ke seluruh organisasi. Selain untuk keperluan dalam internal, anggota parlemen memiliki pengetahuan yang mendalam terkait ESG sehingga kritis terhadap isu lingkungan. Apabila komitmen sudah terbentuk, skema *top down* ini berakibat pada; (1) komunikasi yang lebih terarah; (2) arahan yang jelas untuk mendorong kejelasan penerapan dan (3) penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. ESG harus dianggap sebagai peluang untuk memperkuat dan melengkapi internal organisasi parlemen sehingga sejalan dengan agenda nasional (RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2024-2030) dan agenda internasional.

BKSAP merupakan badan dan alat kelengkapan parlemen. **BKSAP dapat menjadi saluran untuk mempercepat penyebaran pemahaman ESG** di setiap komisi. Penyebaran pemahaman ini penting untuk memastikan semua anggota parlemen mendapatkan informasi yang cukup mengenai ESG. BKSAP ini juga dapat menjadi alat kontrol dalam membangun kepercayaan dan komitmen terhadap proses pelaksanaan penyebaran informasi mengenai ESG dalam internal parlemen. Lebih lanjut, BKSAP dapat mengadakan agenda khusus pembahasan mengenai ESG, sehingga anggota parlemen yang tergabung dalam BKSAP dapat menjadi agen utama dalam pengarusutamaan ESG baik ke masing – masing komisi.

Pemutakhiran Peraturan Perundangan terkait ESG

Parlemen sebagai legislator melalui Badan Legislasi dapat **memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menerapkan konsep ESG ke dalam agenda program legislasi nasional menjadi Undang-Undang.** Parlemen dapat menyusun dan membahas RUU yang mencakup konsep ESG sehingga akan memberikan berdampak langsung terhadap pengarusutamaan konsep ESG. Keperluan UU yang mencakup konsep ESG ini akan memberikan pengaruh yang baik pada penerapan ESG tidak hanya terfokus pada sektor investasi dan keuangan, namun sektor yang lebih luas. UU ini juga menjadi langkah sinkronasi dengan agenda yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Regulasi yang membahas aturan mengenai ESG di Indonesia hingga saat ini antara lain tertuang dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 tahun 2017; Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 tahun 2022 oleh OJK; Manual Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan; Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan; dll. Dalam regulasi-regulasi tersebut, masih perlu ada **penguatan** dalam dalam pelaporan LJK/industri terkait, serta peningkatan transparansi dan kemudahan aksesnya. Lebih lanjut, belum adanya peraturan khusus yang membahas mengenai aspek keberlanjutan sebagai landasan pembentukan regulasi ESG, sehingga peraturan masih tersebar dan belum terintegrasikan. Oleh sebab itu, parlemen dapat memaksimalkan perannya untuk memperbaiki kekurangan regulasi-regulasi terkait ESG sesuai dan tugas dan fungsi parlemen dengan **memadupadankan regulasi yang sudah ada.**

Dalam mendorong pemutakhiran peraturan terkait ESG ini, parlemen baik secara individual maupun institusi dapat memberikan ruang yang sangat besar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memberi dukungan kepada isu ESG ini untuk **disertakan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional** yang sejalan dengan SDGs. Proses ini sesuai dengan alur kerja parlemen antara lain penelaahan utama dengan mempelajari dan menganalisis pentingnya penerapan ESG di Indonesia untuk mendorong target ENDC. Peran parlemen diharapkan tidak hanya di tahap pengesahan saja, namun seharusnya **memaksimalkan perannya dari tahap perumusan dan pembentukan peraturan.**

Harmonisasi Kerangka ESG

Permintaan untuk pelaporan yang konsisten dan transparan mengenai performa ESG semakin meningkat dari investor. Permasalahan ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kerangka kerja dan standar pelaporan hingga pembobotan penilaian yang berbeda (Laidlaw, 2021). Hal ini menyebabkan informasi terkait dengan risiko transisi bagi perusahaan tidak dapat dikomparasi (OECD, 2021).

Negara, melalui parlemen, dapat **menyelaraskan kerangka ESG** untuk implementasinya di Indonesia. Upaya ini telah didukung dengan Revolusi ASEAN yang mendorong pemerintah negara ASEAN untuk mengembangkan indikator dan indeks performa ESG yang relevan serta menciptakan mekanisme untuk mendorong bisnis untuk patuh kepada standar ESG. Hal ini dapat dilakukan dengan mendesain peta jalan regional yang kemudian disesuaikan dengan rencana nasional (Starr, 2022). Penetapan standar ESG pada faktor finansial telah diterapkan oleh banyak parlemen negara dunia. Misalnya, Uni Eropa telah menciptakan reformasi resiko sektor keuangan terkait ESG dan menerapkan *International Basel III Agreement* (Wickersham & Taft, 2023). China memiliki *First Green Investment Guidelines* yang dirilis oleh *The Asset Management Association of China* (AMAC) sebagai pendekatan dalam investasi hijau. Selanjutnya, Hong Kong juga memiliki *List of verified ESG funds* sebagai perangkat untuk melawan *greenwashing* dan *mislabelling* dalam strategi investasi serta *Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering Group* (*Steering Group*) untuk mengkoordinasikan manajemen iklim dan risiko lingkungan pada sektor finansial. Singapura juga memiliki beberapa perangkat yaitu, *Environment Risk Management Guidelines for Asset Managers*, *MAS' Sustainable Bond Grant Scheme*, dan *Singapore Stewardship Principles for Responsible Investors 2016* yang diterapkan dalam implementasi ESG (PWC, 2022). Lebih jauh, **konsistensi juga diwujudkan di tingkat departemen dan multilevel pemerintahan** (Orenstein & Cooke, 2022).

Sinkronisasi juga terjadi antar elemen ESG. Dalam praktik transisi iklim, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah kurang selarasnya kepentingan lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, upaya pembangunan rendah karbon masih kurang mengintegrasikan rencana peningkatan ekonomi dan inklusi sosial (Mattison, et al., 2022). Hal ini perlu menjadi perhatian pada penilaian ESG yang seharusnya menciptakan sinergi antara aspek lingkungan dan sosial.

Parlemen dapat memimpin, dan bersama pemerintah, dapat berperan penting dalam menciptakan keselarasan dalam pelaporan ESG pada berbagai sektor industri. Hal ini dilakukan dengan menyajikan kerangka dan redaksi yang serupa. Harmonisasi komponen ESG harus disesuaikan dengan materialitas sektor industri dan level pemerintahan (APPG ESG, 2022). Sinkronisasi komponen ESG ini dapat dilakukan sembari Indonesia menetapkan peta jalan perkembangan ESG, termasuk target-target interrimnya. Tahapan-tahapan perkembangan juga perlu dan diselaraskan dengan dimensi waktu dan multisektor, untuk menghindari kesenjangan dalam proses pencapaiannya (Uddin & Wu, 2022).

Utilisasi Laporan ESG untuk Keputusan yang Strategis

Tidak hanya mendorong pelaporan yang selaras dan terintegrasi, **parlemen dapat memanfaatkan laporan ESG untuk mengambil keputusan.** Data dan informasi yang terdapat dalam laporan ESG dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan dan sektor industri serta multilevel pemerintahan dari sudut pandang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Parlemen dapat menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi dan peraturan terhadap lingkungan melalui analisis laporan ESG. Laporan ESG menyajikan informasi tentang perlakuan terhadap karyawan, hak asasi manusia, dan keterlibatan dalam masyarakat. Parlemen dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi dampak sosial perusahaan dan sektor industri serta menciptakan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja dan masyarakat. Laporan ESG juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan undang-undang yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, parlemen dapat menggunakan informasi dari laporan ESG untuk membentuk kebijakan investasi yang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan untuk mengalokasikan dana publik ke perusahaan dan sektor industri yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan, sehingga memperkuat pengaruh positif dalam mendorong perubahan menuju keberlanjutan.

Dengan mendasari pengambilan keputusan parlemen pada data dan informasi dari laporan ESG, Indonesia dapat memperkuat komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara seimbang dan berkesinambungan.

Referensi

- Ainurrohmah, S., & Sudarti. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan*, 1-10.
- Al Hikam, H. A. (2023, February 14). Kementerian ESDM: RUU EBT Selesai September. Retrieved from Detik.Com: <https://finance.detik.com/energi/d-6568679/kementerian-esdm-ruu-ebt-selesai-september>
- Amani, N. K. (2023). *Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Rentan Perubahan Iklim*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5215191/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-rentan-perubahan-iklim>
- APPG ESG. (2022). *Recommendations on standardising and regulating ESG performance and assessment and defining impact in the UK*. APPG ESG.
- Arif, A. (2022). *Indonesia Rentan Perubahan Iklim, Diminta Lebih Ambisius Turunkan Emisi*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/28/indonesia-rentan-perubahan-iklim-diminta-lebih-ambisius-turunkan-emisi>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terluka Terkena Dampak Bencana (Orang)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1804/sdgs_13/2
- Bappenas & World Bank. (2021). *Vision 2045: Toward Water Security*. Bank Dunia.
- BKSAP. (2022). *Suarakan Mitigasi Perubahan Iklim, IPU Assembly ke-144 Siap Perkuat Peran Parlemen Dunia*. Retrieved from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37601/t/Suarakan+Mitigasi+Perubahan+Iklim%2C+IPU+Assembly+ke-144+Siap+Perkuat+Peran+Parlemen+Dunia>
- Boffo, R. (2020). *ESG Investing: Environmental Pillar Scoring and Reporting*. OECD Paris.
- Bulolo, C. (2022, Desember 19). *Indonesia's new climate plan: Slow progress but change imminent*. Retrieved from China Dialogue: <https://chinadialogue.net/en/climate/indonesias-new-climate-plan-slow-progress-but-change-imminent/>
- Bündnis Entwicklung Hilft; IFHV. (2022). *World Risk Report 2022*. Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum.
- Climate Action Tracker. (2022). *Indonesia*. Climate Action Tracker.
- Daubeney, H. (2022). *What is the big news at COP26 for ESG reporting?* Retrieved from PwC: <https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/cop26/what-is-the-big-news-at-cop26-for-esg-reporting-pwc-cop26.html>
- Dihni, V. A. (2023, Februari 23). *Cek Data: Politisi Berlatar Belakang Pengusaha Takkan Korupsi?* Retrieved from Katadata.com: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/cek-data/63f754767a4a9/cek-data-politisi-berlatar-belakang-pengusaha-takkan-korupsi>
- European Commission. (2023). *INFORM Risk 2023*. European Commission.
- European Commission. (INFORM Index for Risk Management. Indonesia Country Profile). 2019. European Commission.
- Genete, M. M. (2021). 2021. *Agriculture Food and Security*, 2-3.
- IESR. (2022). *Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- IGGP. (2021). *Update NDC Indonesia Untuk Masa Depan Yang Tangguh Iklim*. Retrieved from Indonesia Green Growth Program: [http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/#:~:text=Komitmen%20Indonesia%20diperkuat%20melalui%20dokumen,\(BAU\)%20pada%20tahun%202030.](http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/#:~:text=Komitmen%20Indonesia%20diperkuat%20melalui%20dokumen,(BAU)%20pada%20tahun%202030.)
- Kemenkeu. (2022). *Menkeu: Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Rentan-terhadap-Dampak-Perubahan-Iklim>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Perempuan, Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim*. Retrieved from Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/perempuan-kesetaraan-gender-dan-perubahan-iklim/>
- Komitmeniklim.id. (2021). *NDC: Komitmen Iklim Indonesia*. Retrieved from <https://komitmeniklim.id/ndc-komitmen-iklim-indonesia/>
- Laidlaw, J. (2021, Oktober 15). *New global sustainability board aims to cut through disclosure confusion*. Retrieved from S&P Global: <https://www.spglobal.com/esg/insights/new-global-sustainability-board-aims-to-cut-through-disclosure-confusion>
- LCDI. (2022). *Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya*. Retrieved from LCDI: <https://lcdi-indonesia.id/2022/01/11/bappenas-prediksi-kerugian-akibat-perubahan-iklim-rp-544-t-begini-rinciannya/>
- Low Carbon Development Indonesia. (2022, January 11). *Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya*. Retrieved from Aksara - LCDI BAPPENAS: <https://lcdi-indonesia.id/2022/01/11/bappenas-prediksi-kerugian-akibat-perubahan-iklim-rp-544-t-begini-rinciannya/>
- Lubis, R. F., & Delinom, R. (2010). *Perubahan Iklim dan Pemanasan Global di Indonesia: Dampaknya Terhadap Kondisi Bawah Permukaan Studi Kasus DKI Jakarta*. *Jurnal LIPI*, 1-6.
- Marispatin, N., Rachmawaty, E., Y, S., H, S., Farid, M., & Iskandar, N. (2017). *STRATEGI IMPLEMENTASI NDC*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Retrieved from https://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_implementasi_ndc.pdf
- Marlier, M. E., DeFries, P., Kim, S., Gaveau, D., Koplitz, S., Jacob, D., . . . and Myers, S. (2015). Regional air quality impacts of future fire emissions in Sumatra and Kalimantan. *Environmental Research Letters* .

- Mattison, R., Longevialle, B. d., Bastit, B., Hall, L., Ly, L., Munday, P., & Thomson, B. (2022, Januari 31). *Key trends that will drive the ESG agenda in 2022*. Retrieved from S&P Global: <https://www.spglobal.com/esg/insights/featured/special-editorial/key-esg-trends-in-2022>
- Maxwell, D., & Tynan, T. (2021, Desember 10). *ESG in the wake of COP26*. Retrieved from DAVY: <https://www.davy.ie/market-and-insights/insights/capital-markets/horizons/esg-in-the-wake-of-cop-26.html>
- NGFS. (2019). *A Call for Action: Climate Change as a Source of Financial Risk*. The Network of .
- OECD. (2021). *ESG Investing and Climate Transition*. OECD.
- Orenstein, M., & Cooke, B. (2022). *ESG | Why should governments care and what can governments do?* Calgary: Canada West Foundation.
- Pardosi, I., Damayanti, E., Anggraini, D., & Sumedi, P. (2020). *Dampak Perubahan Iklim Berkaitan Dengan Produksi Pengolahan Pangan Lokal dan Perempuan*. Retrieved from Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/dampak-perubahan-iklim-berkaitan-dengan-produksi-pengolahan-pangan-lokal-dan-perempuan>
- Pranita, E. (2021). *Hari Bumi: Ketahui 10 Dampak Perubahan Iklim di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/22/183000123/hari-bumi--ketahui-10-dampak-perubahan-iklim-di-indonesia?page=all>
- PWC. (2022). *Environmental, Social, and Governance (ESG) in ASIA : Asset and Wealth Management*. Retrieved from <https://www.pwc.com/sg/en/asset-management/assets/environmental-social-and-governance-in-asia-awm.pdf>
- Ruminta, Handoko, & Nurmala, T. (2018). *Indikasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Indonesia*. *Jurnal Agro*, 1-13.
- Simanjuntak, U. (2022). *Kenaikan Target Penurunan Emisi di NDC Indonesia Masih Jauh untuk Mencegah Krisis Iklim*. Retrieved from IESR: <https://iesr.or.id/kenaikan-target-penurunan-emisi-di-ndc-indonesia-masih-jauh-untuk-mencegah-krisis-iklim>
- Starr, P. (2022, November 24). *Asean parliaments issue clarion call for ESG action*. Retrieved Mei 1, 2023, from The Asset: <https://www.theasset.com/article-esg/48151/asean-parliaments-issue-clarion-call-for-esg-action>
- Subramanian, S., & Mahmood, R. (2022). *Regulators turn their gaze to ESG funds*. In MSCI, *ESG and Climate Trends to Watch for 2023* (p. 13). MSCI.
- Sustainalytics. (2022). *Getting Started With ESG: What Every Company Needs to Know*. Sustainalytics.
- TCFD. (2022). *2022 Status Report*. Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
- The Conversation. (2021). *Petani dan nelayan tak bisa menghadapi pemanasan global sendirian, harus berkelompok*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/petani-dan-nelayan-tak-bisa-menghadapi-pemanasan-global-sendirian-harus-berkelompok-168618>
- Uddin, Z., & Wu, E. Z. (2022). *Climate target disclosure standards: Regulatory inconsistencies remain*. In MSCI, *ESG and Climate Trends to Watch for 2023* (p. 15). MSCI.
- UN Women. (2022). *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*. Retrieved from UN Women: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>
- UNFCCC. (n.d.). *NDC Registry*. Retrieved from UNFCCC: <https://unfccc.int/NDCREG>
- Unicef Indonesia. (2021). *Anak-anak di Indonesia 'berisiko tinggi' alami dampak krisis iklim - UNICEF*. Retrieved from Unicef Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/anak-anak-di-indonesia%C2%A0berisiko-tinggi%C2%A0alami%C2%A0dampak-krisis-iklim%C2%A0-unicef%C2%A0>
- WHO. (2015). *Climate and health country profile - 2015 Indonesia*. Retrieved from World Health Organization: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249519/WHO-FWC-PHE-EPE-15.37-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wickersham, C., & Taft. (2023, Februari 9). *European Parliament Committee Finalizes ESG-Related Financial Sector Risk Reforms*. Retrieved from Lexology: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=812ac9d5-3451-418a-87ae-2b8e5c67c99a>
- World Bank Group; ADB. (2021). *Climate Risk Country Profile Indonesia*. World Bank Group; DB.

Tentang Penyusun

AMF adalah organisasi nonprofit berbadan hukum yayasan yang mengedepankan pemecahan masalah lingkungan dan penghidupan berkelanjutan secara strategis dan solutif. AMF menyediakan solusi strategis dalam mendorong praktik-praktik pembangunan berkelanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan dan publik dalam pembangunan berkelanjutan.

PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan (MIREKEL) merupakan perusahaan milik AMF yang memberikan layanan berupa konsultasi, jasa penasihat, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang ESG serta kolaborasi. MIREKEL meyakini pentingnya ESG dan kolaborasi terhadap keberlanjutan setiap kegiatan usaha dari beragam sektor industri.

✉	admin@amf.or.id	info@MIREKEL.id
🌐	amf.or.id	mirekel.id
📷	anwarmuhammad.foundation	mirekel__id
📘	Anwar Muhammad Foundation	PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan
🌐	Anwar Muhammad Foundation	PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan
📍	Jl. O Kavling No. 12 RT 10 RW 14 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan	